



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2019

No. 62/08/Th. XXIII, 3 Agustus 2020

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

IDI merupakan usaha bersama sejak tahun 2009 antara:



Badan Pusat Statistik (BPS)



Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM)



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)



Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)





IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia



IDI adalah *Fact-Based Information*, bagian dari upaya mengembangkan *a culture of evidence-based decision making*, yang sesuai deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008



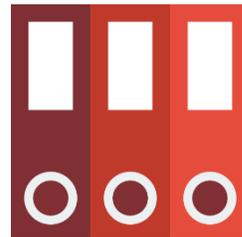
Setiap angka IDI mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan

KOMPONEN IDI TERDIRI ATAS 3 ASPEK, 11 VARIABEL, DAN 28 INDIKATOR

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Kebebasan Sipil 	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-Hak Politik 	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
Lembaga Demokrasi 	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Dokumen

Berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, dsb



Surat Kabar

- Satu per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas



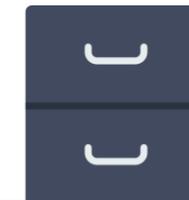
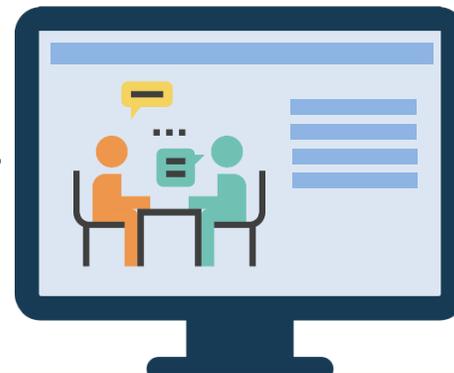
Focus Group Discussion (FGD)

Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari *stakeholder*



Wawancara Mendalam (WM)

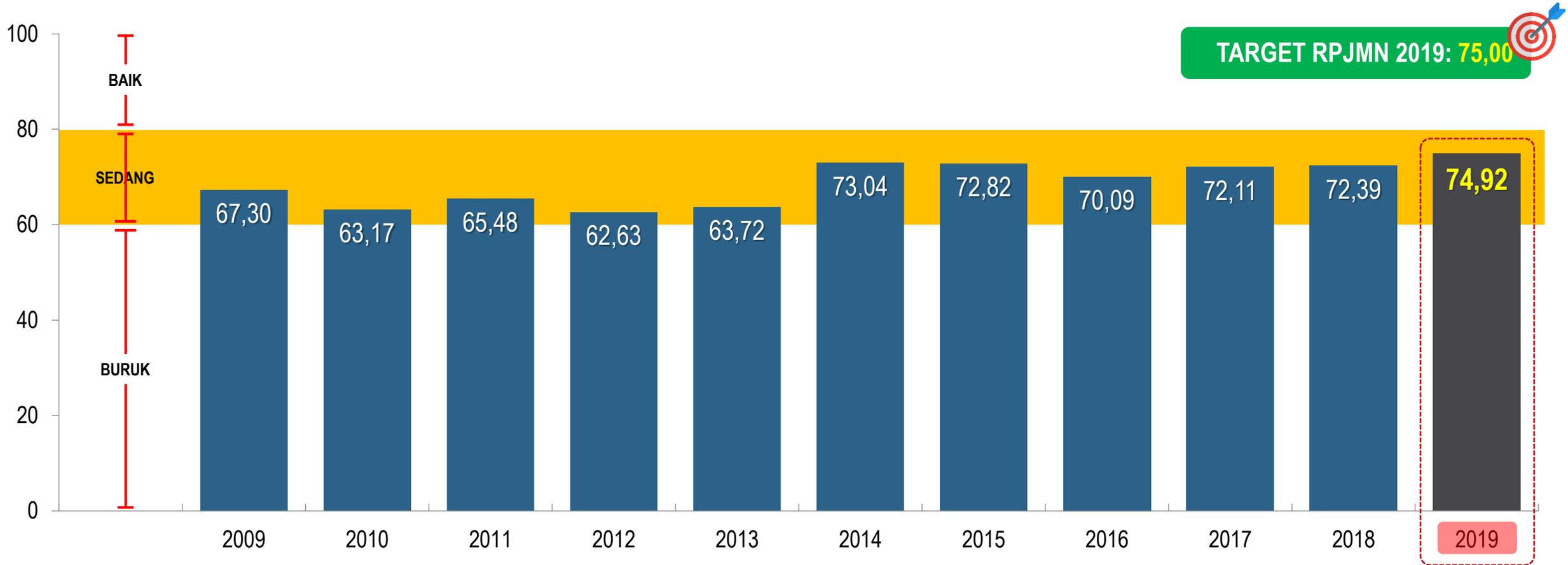
Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber/ahli



Big Data

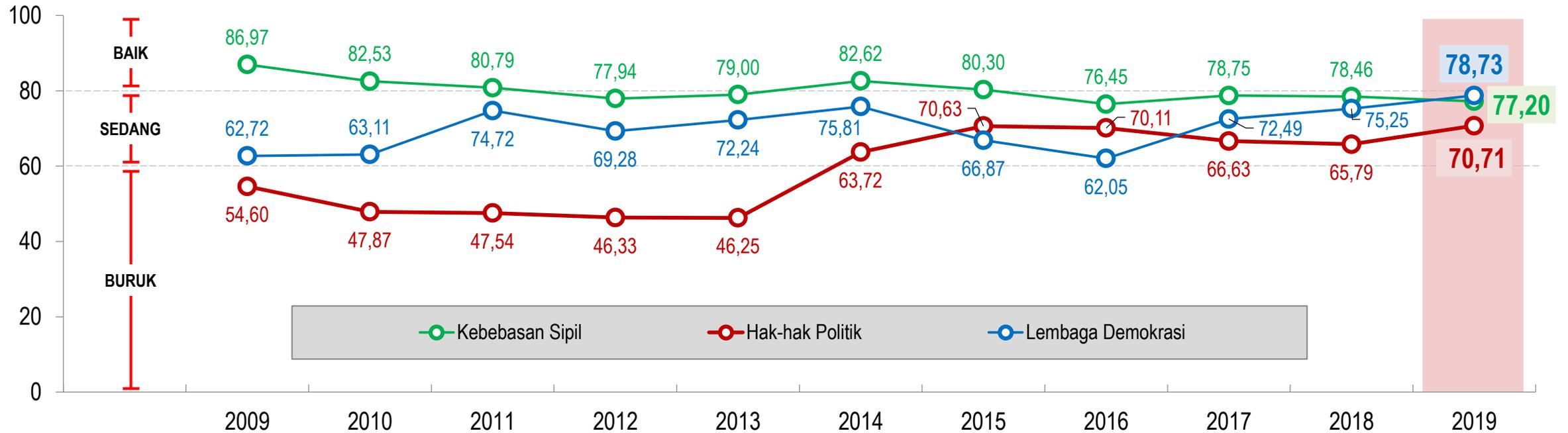
Verifikasi fakta yang diperoleh dari FGD dan WM dengan portal berita online

PERKEMBANGAN IDI NASIONAL, 2009-2019



- ▶ Target IDI 2019 pada RPJMN 2015 – 2019 sebesar **75,00**
- ▶ Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 mencapai **74,92** naik 2,53 poin dibandingkan tahun 2018
- ▶ Tingkat Demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam kategori **SEDANG**

PERKEMBANGAN INDEKS ASPEK IDI NASIONAL, 2009-2019



Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2019 sebesar **77,20**; turun **1,26 poin** dibanding 2018 dan masuk kategori sedang.



Indeks Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2019 sebesar **70,71**; naik **4,92 poin** dibanding 2018 dan masuk kategori sedang.



Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 sebesar **78,73**; naik **3,48 poin** dibanding 2018 dan masuk kategori sedang.

PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI NASIONAL, 2018-2019

ASPEK	VARIABEL	2018	2019	SELISIH (2019-2018)
 KEBEBASAN SIPIL 	I. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,35	78,03	-4,32
	II. Kebebasan Berpendapat	66,17	64,29	-1,88
	III. Kebebasan Berkeyakinan	82,86	83,03	0,17
	IV. Kebebasan dari Diskriminasi	91,77	92,35	0,58
 HAK-HAK POLITIK 	V. Hak Memilih dan Dipilih	75,77	79,27	3,50
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	54,28	56,72	2,44
 LEMBAGA DEMOKRASI 	VII. Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	85,75	-9,73
	VIII. Peran DPRD	58,92	61,74	2,82
	IX. Peran Partai Politik	82,10	80,62	-1,48
	X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	55,74	62,58	6,84
	XI. Peran Peradilan yang Independen	90,72	93,66	2,94

Kenaikan

INDEKS VARIABEL YANG MENGALAMI KENAIKAN :



Penurunan

INDEKS VARIABEL YANG MENGALAMI PENURUNAN:



PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK KEBEBASAN SIPIL

tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

MENGALAMI PERBAIKAN



Perbaikan terjadi karena **MENURUN**nya:

- 4** Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- 10** Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok rentan lainnya.
- 2** Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- 5** Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
- 8** Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya

MENGALAMI KEMUNDURAN



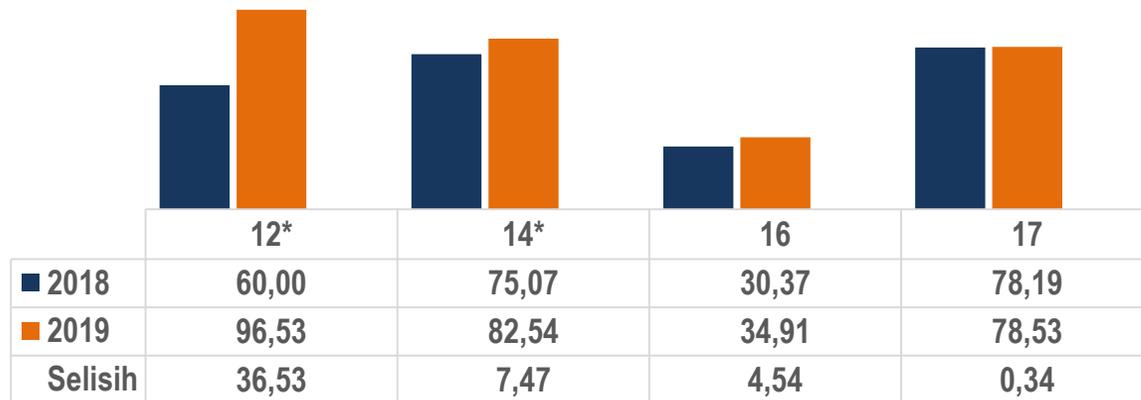
Kemunduran terjadi karena **MENINGKAT**nya:

- 1** Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- 3** Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
- 7** Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama
- 9** Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
- 6** Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama

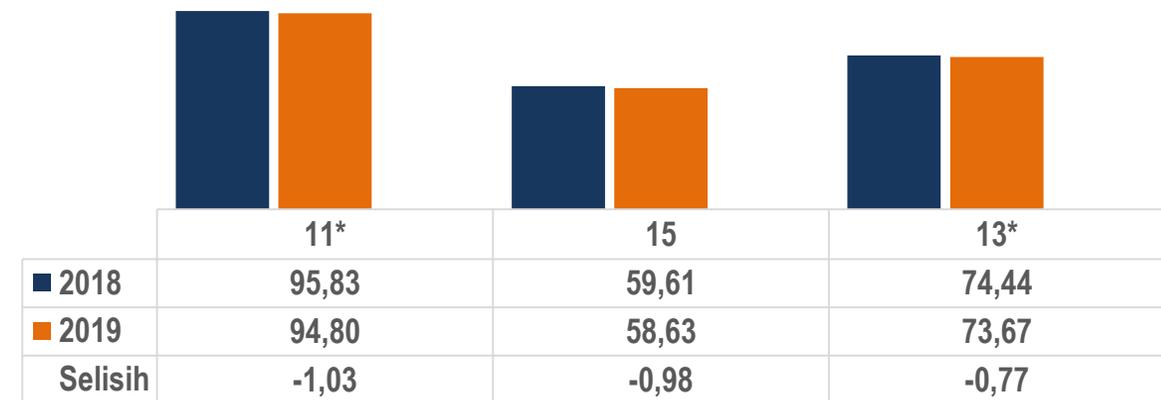
PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK HAK-HAK POLITIK

tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

MENGALAMI PERBAIKAN



MENGALAMI KEMUNDURAN



*) Indikator 11-14 terkait Pemilu 2019

Perbaikan terjadi karena:

- 12** Meningkatnya penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih
- 14** Meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019
- 16** Menurunnya demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
- 17** Meningkatnya kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

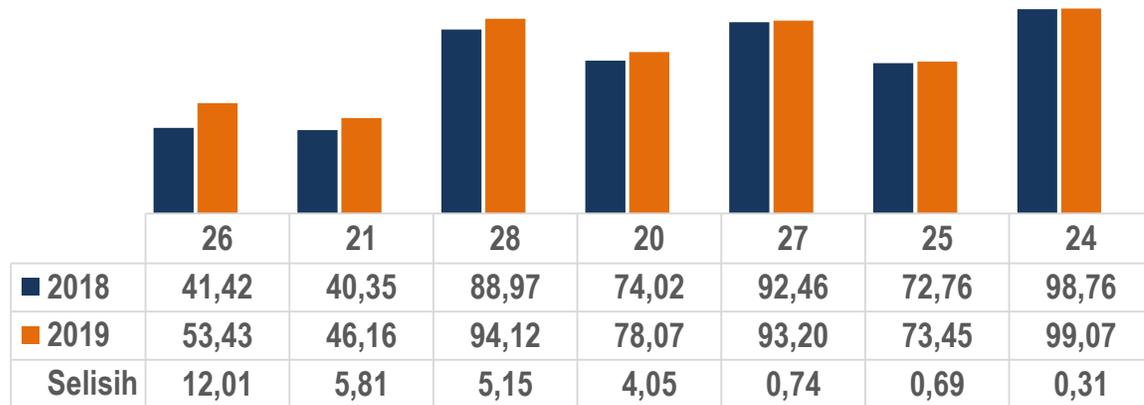
Kemunduran terjadi karena:

- 11** Meningkatnya hambatan pada hak memilih atau dipilih
- 15** Menurunnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi
- 13** Menurunnya Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

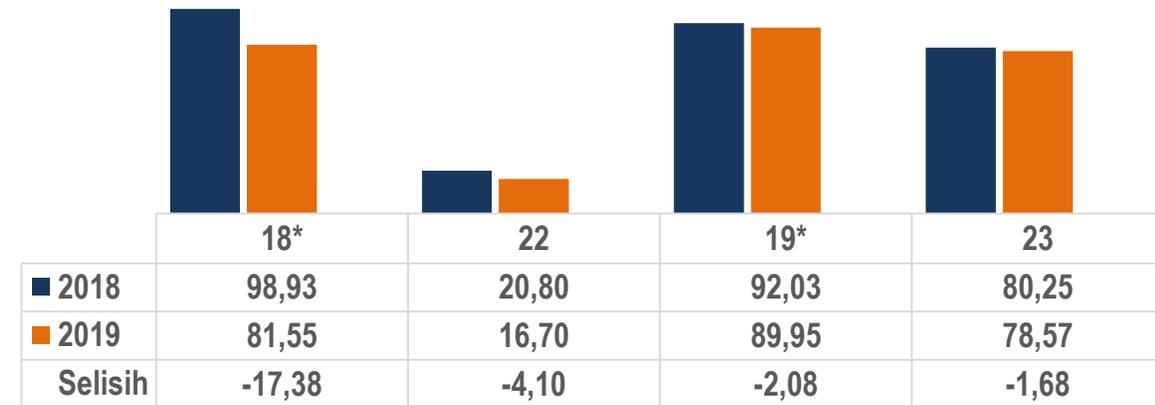
MENGALAMI PERBAIKAN



Perbaikan terjadi karena:

- 26** Meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
- 21** Meningkatnya Perda yang merupakan inisiatif DPRD
- 28** Menurunnya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
- 20** Meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
- 27** Menurunnya keputusan hakim yang kontroversial
- 25** Menurunnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN
- 24** Meningkatnya persentase perempuan pengurus partai politik

MENGALAMI KEMUNDURAN



*) Indikator 18-19 terkait Pemilu 2019

Kemunduran terjadi karena:

- 18** Menurunnya netralitas penyelenggara Pemilu
- 22** Menurunnya rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
- 19** Meningkatnya kecurangan dalam penghitungan suara
- 23** Menurunnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu

MASIH ADA 6 INDIKATOR YANG BERKATEGORI BURUK YAITU

11,40
Indikator 4
57,35

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

5,81
Indikator 21
46,16

Perda yang merupakan inisiatif DPRD

0,98
Indikator 15
58,63

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi

4,10
Indikator 22
16,70

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

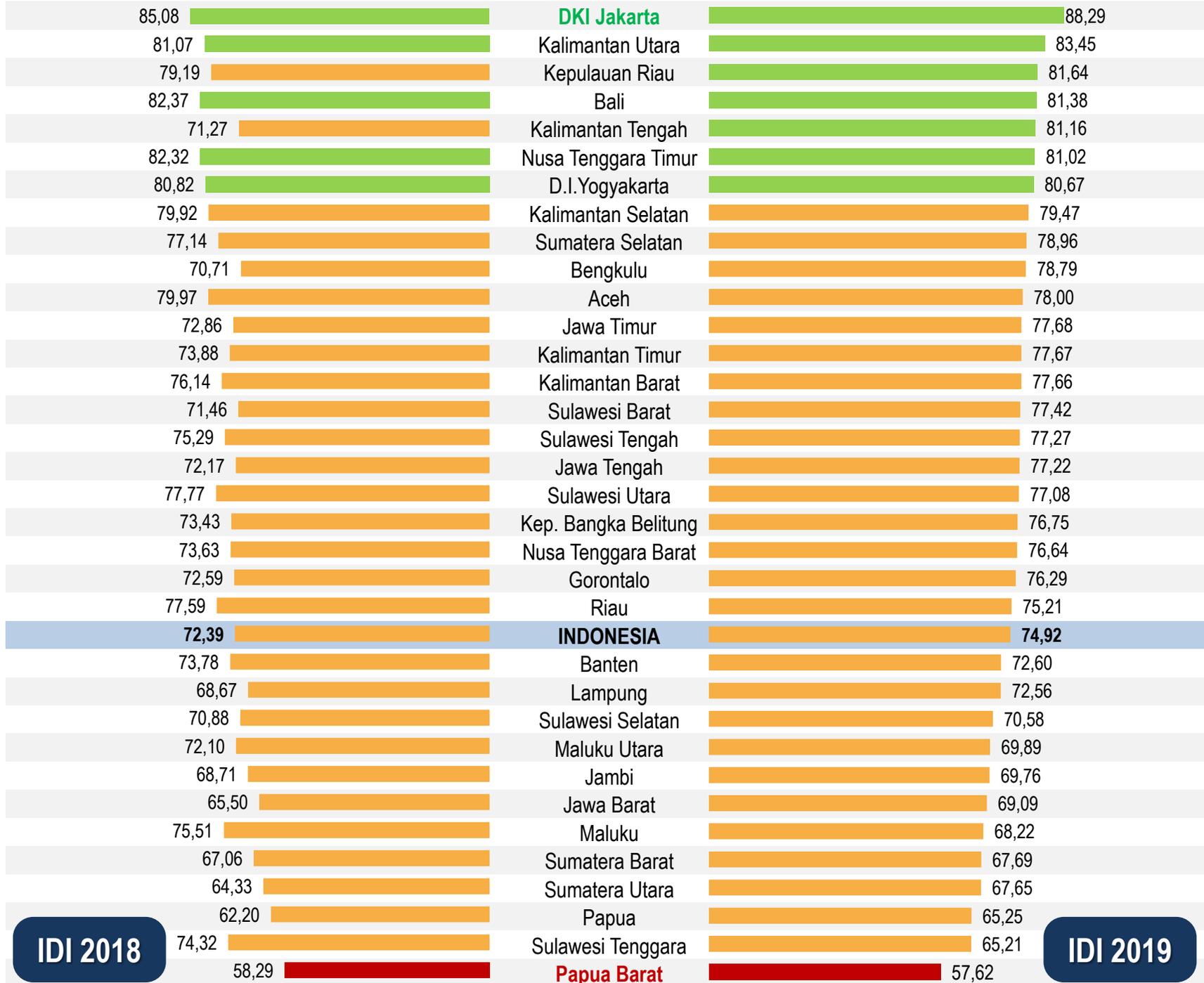
4,54
Indikator 16
34,91

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

12,01
Indikator 26
53,43

Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah





PERKEMBANGAN IDI PROVINSI 2018-2019



Keterangan:

- > 80 (Baik)
- 60 – 80 (Sedang)
- < 60 (Buruk)

IDI 2018

IDI 2019

KESIMPULAN



01

Angka IDI nasional pada tahun 2019 sebesar 74,92, **mendekati target** yang dicanangkan pemerintah sebesar 75 di akhir RPJMN 2015-2019.

02

Peningkatan Aspek Lembaga Demokrasi terutama disebabkan oleh:

- ✓ Meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,
- ✓ Meningkatnya Perda yang merupakan inisiatif DPRD,
- ✓ Menurunnya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

03

Peningkatan Aspek Hak-Hak Politik terutama disebabkan oleh:

- ✓ Meningkatnya penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih,
- ✓ Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019,
- ✓ Menurunnya demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

04

Penurunan Aspek Kebebasan Sipil terutama disebabkan oleh:

- ✓ Meningkatnya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- ✓ Meningkatnya ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- ✓ Meningkatnya Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.